

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA 2015



**STATISTIK PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA 2015**

Katalog BPS : 4104001.3316

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : vi + 37 halaman

Naskah :

Rini Astuti, S.ST

Fungsional Statistisi Pertama BPS Kabupaten Blora

Gambar Kulit :

Rini Astuti, S.ST

Fungsional Statistisi Pertama BPS Kabupaten Blora

Edisi Cetakan :

Tahun 2016

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Blora 2015 menyajikan informasi tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Blora, yang mencakup penunjang pendidikan, partisipasi sekolah dan pembangunan pendidikan. Data yang disajikan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014 dan 2015. Informasi yang ditampilkan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Blora, 31 Oktober 2016

BPS Kabupaten Blora

Kepala



Drs. Heru Prasetyo

NIP. 19641021 199102 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penyajian	2
BAB II METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data	3
2.3. Konsep dan Definisi	3
2.4. Metode Analisis.....	6
BAB III PENUNJANG PENDIDIKAN	7
3.1. Sarana Prasarana Pendidikan	7
3.2. Penggunaan Internet	9
3.3. Biaya Pendidikan	10
3.4. Bantuan Pendidikan	12
BAB IV PARTISIPASI PENDIDIKAN	14
4.1. Pendidikan Prasekolah	15
4.2. Partisipasi Sekolah	19
4.3. Angka Partisipasi Kasar	24
4.5. Angka Partisipasi Murni	26

BAB V PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	28
5.1. Angka Melek Huruf	28
5.2. Rata-rata Lama Sekolah	31
5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	33
BAB VI PENUTUP	36
6.1. Kesimpulan	36
6.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37

<http://blorakab.bps-go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, Tahun Ajaran 2014/2015	8
Tabel 3.2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Biaya Pendidikan Tiap Bulan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Kabupaten Blora, 2015 (Rupiah)	12
Tabel 3.3. Persentase Rumah Tangga Penerima BSM menurut Tipe Daerah Kabupaten Blora, 2015	13
Tabel 4.1. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah Kabupaten Blora, 2015	16
Tabel 4.2. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015	18
Tabel 4.3. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015	18
Tabel 4.4. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Kabupaten Blora, 2015	19
Tabel 4.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora, 2015	21
Tabel 4.6. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora, 2015	21
Tabel 4.7. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2015	23

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015.....	29
Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015.....	29
Tabel 5.3. Angka Putus Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2015	32
Tabel 5.4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Blora, 2015.....	33
Tabel 5.5. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Blora, 2015.....	34

<http://blorakab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Rasio Murid/Guru, Guru/Sekolah, dan Murid/Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, Tahun Ajaran 2014/2015	8
Gambar 3.2. Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Kabupaten Blora, 2014-2015	10
Gambar 4.1. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra sekolah Kabupaten Blora, 2014-2015	17
Gambar 4.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora, 2014-2015	22
Gambar 4.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2014-2015	24
Gambar 4.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Blora, 2014-2015	25
Gambar 4.7. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Blora, 2014-2015	27
Gambar 5.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2014-2015	30
Gambar 5.2. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Blora, 2013-2015	31
Gambar 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2014-2015	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 12 secara khusus menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan oleh pemerintah pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender.

Informasi maupun gambaran mengenai situasi dan kondisi pendidikan dinilai sangat penting. Publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan pencerahan, monitor dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyajian publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Blora adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Blora. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari tiga aspek, yaitu penunjang pendidikan, partisipasi sekolah dan hasil pembangunan pendidikan.

1.3 Sistematika Penyajian

Bagian awal publikasi ini menyajikan abstraksi untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi. Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian.

Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data, konsep dan definisi, serta metode analisis.

Bab 3 memaparkan tentang penunjang pendidikan seperti sarana dan prasarana, penggunaan internet, biaya sekolah dan beasiswa sekolah.

Bab 4 menyajikan pembahasan mengenai partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan prasekolah, partisipasi sekolah, serta pendidikan kesetaraan.

Bab 5 membahas tentang hasil-hasil pembangunan pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan putus sekolah.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015. Jenis datanya mencakup:

1. Data Kor (inti) Susenas Tahun 2015, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan seperti penunjang pendidikan, partisipasi pendidikan dan hasil pembangunan pendidikan.
2. Data modul konsumsi Susenas Tahun 2015, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai konsumsi rumah tangga terkait dengan pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk.

Selain data susenas, publikasi ini juga menggunakan data sekunder mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang berasal dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora dan Kementerian Agama Kabupaten Blora.

2.2. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini di antaranya adalah:

1. Tipe Daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator

komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan, seperti sekolah TK, SMP, SMA, pasar, pertokoan, bioskop, rumah sakit, hotel/bilyar/diskotik/panti pijat/salon, penggunaan telepon dan listrik.

2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C). Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud disini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.

3. Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

4. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
6. Angka Putus Sekolah (APTs) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang putus sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Melanjutkan adalah proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang telah tamat pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan melanjutkan bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
7. Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf lainnya.
8. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

9. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat. SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat. PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2/S3 dan sederajat.

2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana disertai grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

BAB III

PENUNJANG PENDIDIKAN

Mutu pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sarana prasarana merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Selain itu maju tidaknya mutu pendidikan juga tidak terlepas dari faktor internal yang dimiliki dari setiap individu itu sendiri, seperti sarana transportasi yang digunakan menuju sekolah, kemampuan membayar biaya pendidikan, dan lain-lain.

Gambaran faktor internal rumah tangga dalam upaya memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara akan dibahas pada bab ini, dimulai dari kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek penggunaan internet, biaya pendidikan termasuk bantuan pendidikan yang diterima rumah tangga.

3.1. Sarana Prasarana Pendidikan

Ketersediaan guru dan sekolah yang memadai menjadi salah satu hal mendasar yang mempengaruhi keberhasilan pemerataan pendidikan. Jumlah guru dan sekolah ini diharapkan dapat mengimbangi jumlah murid yang mengikuti pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.

Tabel 3.1. memperlihatkan terjadinya penurunan jumlah murid, guru maupun sekolah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua murid pada suatu jenjang pendidikan akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kenyataan ini diikuti dengan semakin sedikitnya penyediaan guru dan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

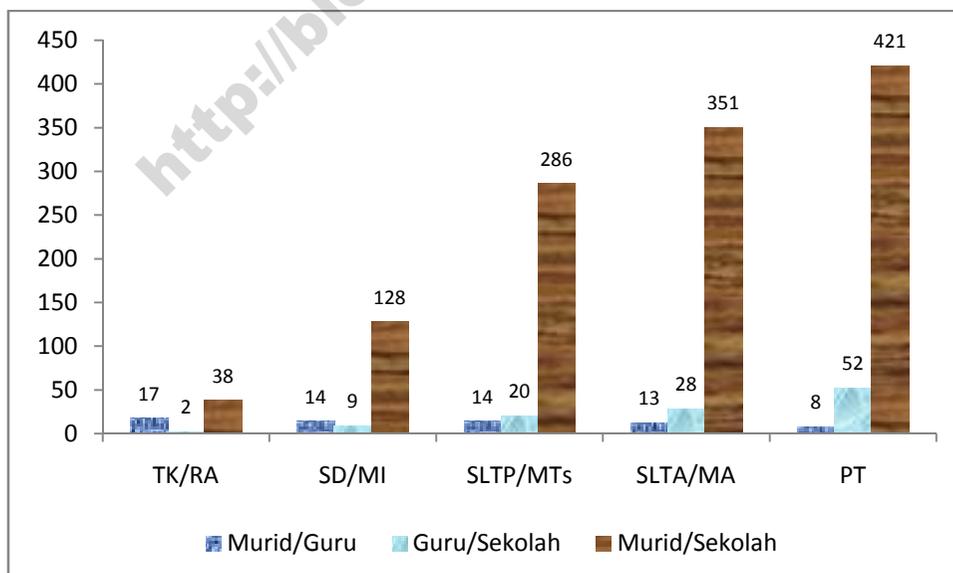
Tabel 3.1. Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, Tahun Ajaran 2014/2015

Jenjang Pendidikan	Murid	Guru	Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/RA	20.507	1.179	537
SD/MI	83.099	5.929	651
SMP/MTs	40.583	2.857	142
SMA/MA	28.398	2.271	81
PT	3.364	419	8

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Kementerian Agama Kab. Blora.

Gambar 3.1. secara umum menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, maka akan semakin tinggi pula rasio guru/sekolah dan rasio murid/sekolah. Sebaliknya, rasio murid/guru akan semakin rendah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1. Rasio Murid/Guru, Guru/Sekolah, dan Murid/Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, Tahun Ajaran 2014/2015



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Kementerian Agama Kab. Blora.

Pada tingkat pendidikan dasar, khususnya SD, nilai rasio murid/guru sebesar 14 dan nilai rasio guru/sekolah tercatat sebesar 9. Hal ini telah memenuhi standar pendidikan minimal (SPM) yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2, yang salah satunya menyebutkan bahwa setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan. Sementara itu, untuk tingkat SMP/MTs diharapkan jumlah murid tidak melebihi 36 murid per kelas dan tersedia 1 guru untuk masing-masing pelajaran.

3.2. Penggunaan Internet

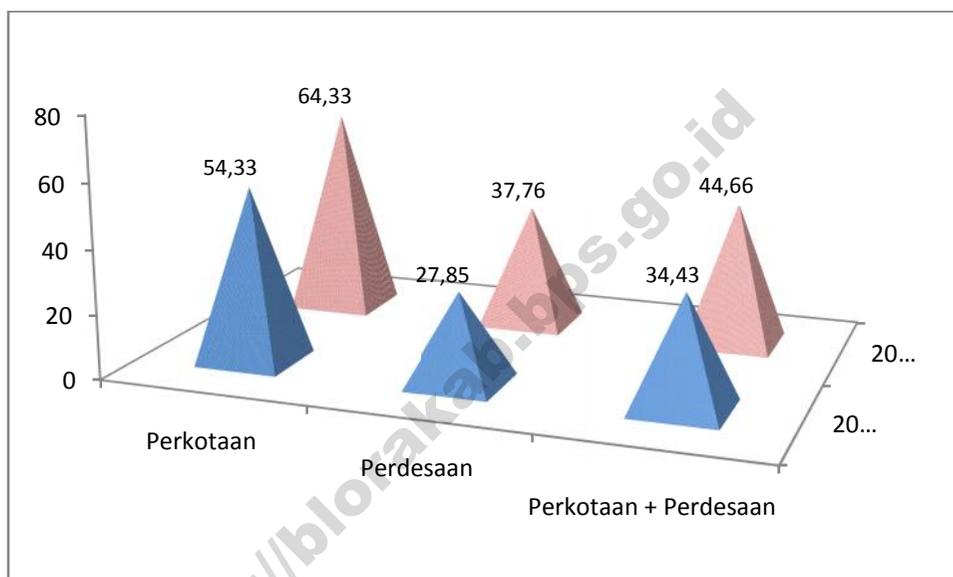
Di era modern seperti saat ini, internet sudah menjadi salah satu media yang sangat penting bagi siapapun dalam memperluas wawasannya. Manfaat Internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Manfaat Internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan. Kehadiran internet bukanlah pengganti sistem pendidikan melainkan lebih bersifat penambah dan pelengkap.

Selain memberikan manfaat bagi siswa, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya menyajikan informasi-informasi positif saja, namun juga informasi-informasi yang bersifat negatif. Oleh karena itu penggunaan internet oleh siswa sebaiknya mendapat pengawasan intensif dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Gambar 3.2. menunjukkan persentase siswa sekolah yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Secara umum, ada lebih banyak siswa yang tidak mengakses internet dibanding yang mengaksesnya. Dalam kurun waktu 2014-2015 terdapat peningkatan siswa yang mengakses internet dari tahun 34,43

persen menjadi 44,66 persen. Dilihat berdasarkan daerahnya, siswa di daerah perkotaan lebih banyak yang mengakses internet dibanding di daerah perdesaan (54,33 persen dibanding 27,85 persen pada tahun 2014 dan 64,33 persen dibanding 37,76 persen pada tahun 2015).

Gambar 3.2. Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber : Susenas, 2014-2015

3.3. Biaya Pendidikan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah

daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan yang dicakup dalam Susenas merupakan keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi: (i) biaya pendaftaran, yaitu uang pangkal/gedung/daftar ulang; (ii) biaya operasional, terdiri atas uang SPP, komite sekolah, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, evaluasi/ujian, bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olah raga, buku pelajaran/panduan/diktat, lembar kerja siswa, alat tulis dan perlengkapannya, kursus yang diselenggarakan sekolah, dan atau biaya rutin operasional pendidikan lainnya; (iii) biaya transportasi dan uang saku.

Secara keseluruhan, pengeluaran biaya pendidikan pada tahun 2015 mencapai Rp. 3.789 per kapita per bulan. Pengeluaran biaya pendidikan di daerah perkotaan terlihat lebih tinggi dibanding daerah perdesaan (Rp. 5.086 dibanding Rp. 3.386 per kapita per bulan).

Dirinci menurut jenis pengeluaran pendidikan, tampak bahwa pengeluaran pendidikan yang terbesar berasal dari jenis pengeluaran uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG, yaitu sebesar Rp. 2.615 per kapita per bulan. Sementara itu, pengeluaran yang paling kecil berasal dari pembelian alat tulis, yang hanya mencapai Rp. 148 per kapita per bulan.

Tabel 3.2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Biaya Pendidikan Tiap Bulan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Kabupaten Blora, 2015 (Rupiah)

Tipe Daerah	Sum-bangan Pemba-ngunan Sekolah	SPP dan luran BP3/ POMG	luran Sekolah Lainnya	Buku Pelajaran dan Fotokopi Bahan Pelajaran	Alat-alat Tulis	Uang Kursus	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	365	3.194	455	254	152	665	5.086
Perdesaan	289	2.434	265	214	147	37	3.386
Total	307	2.615	310	223	148	185	3.789

Sumber : Susenas, 2015

3.4. Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dikeluarkan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Bantuan ini dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.

Salah satu jenis bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan siswa miskin (BSM). Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat bersekolah. Besaran BSM yang diberikan berbeda untuk tiap jenjang pendidikan, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin besar dana BSM yang diperoleh.

Persentase rumah tangga yang menerima BSM pada tahun 2015 hanya sekitar 11,45 persen secara keseluruhan. Sebagian besarnya (9,04 persen) adalah rumah tangga di perdesaan, sedangkan 2,40 persen sisanya dalah rumah tangga di perkotaan. Dari tabel 3.2 di atas juga terlihat bahwa semakin tinggi jenjang

pendidikan, semakin kecil persentase rumah tangga yang menerima BSM. Terdapat 7,95 persen rumah tangga yang hanya menerima BSM SD, 2,12 persen rumah tangga yang hanya menerima BSM SMP dan 0,61 persen rumah tangga yang hanya menerima BSM SMA. Sementara itu terdapat pula 0,76 persen rumah tangga yang menerima lebih dari satu jenis BSM.

Tabel 3.3. Persentase Rumah Tangga Penerima BSM menurut Tipe Daerah Kabupaten Blora, 2015

Tipe Daerah	BSM Gabungan	BSM SD	BSM SMP	BSM SMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	0,20	1,82	0,15	0,23	2,40
Perdesaan	0,56	6,14	1,97	0,38	9,04
Total	0,76	7,95	2,12	0,61	11,45

Sumber : Susenas, 2015

BAB IV

PARTISIPASI PENDIDIKAN

The Education for All (EFA) Movement atau Gerakan Pendidikan untuk Semua adalah satu komitmen gerakan bersama yang diluncurkan oleh masyarakat dunia peduli pendidikan untuk menyediakan pendidikan dasar (*basic education*) untuk semua anak usia sekolah. Untuk Indonesia, jenjang pendidikan dasar meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), yakni untuk anak usia 7 sampai 15 tahun. Sementara itu, masyarakat global peduli pendidikan kemudian juga menilai penting untuk menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini (*Early Childhood Education*), yakni untuk anak usia 0 – 6 tahun. Para pakar pendidikan meyakini bahwa kecerdasan anak berkembang secara optimal pada usia 0 – 6 tahun ini, yang dikenal dengan usia keemasan (*the golden age*).

Dalam forum tersebut, 164 negara telah menandatangani kesepakatan untuk mencapai 6 (enam) sasaran EFA yang akan dicapai pada tahun 2015. Keenam sasaran ini meliputi: meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia dini, memberikan pendidikan dasar untuk semua secara gratis, memperluas kesempatan belajar bagi remaja dan orang dewasa, mencapai 50 % peningkatan dalam keaksaraan orang dewasa khususnya perempuan, mencapai kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam tujuan EFA (*Education For All*) tersebut disepakati supaya tercapai mulai tahun 2005 dan selambat-lambatnya terpenuhi pada tahun 2015.

Sebagai kelanjutan dari EFA, telah dicanangkan sistem pembangunan baru yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang salah satunya bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan ini diharapkan akan tercapai pada tahun 2030.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa setiap warga negarayang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2015 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah.

4.1. Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan prasekolah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional, bahasa dan komunikasi, sesuai dengan

keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Contoh pendidikan prasekolah pada jalur formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pada jalur nonformal contohnya adalah PAUD, PAUD terintegrasi Bina keluarga Balika/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Tabel 4.1. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah Kabupaten Blora, 2015

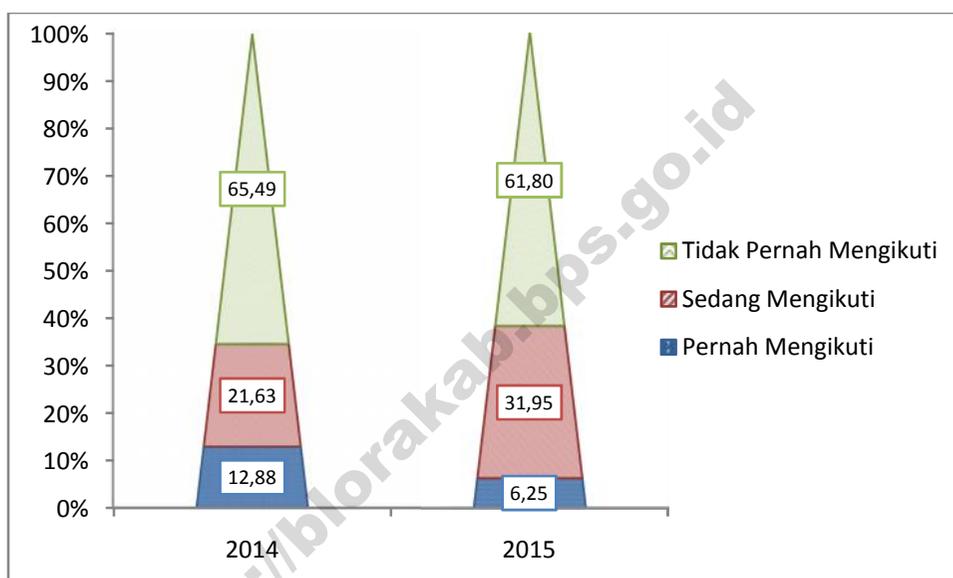
Tipe Daerah	Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah			Total
	Pernah Mengikuti	Sedang Mengikuti	Tidak Pernah Mengikuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	3,97	35,09	60,94	100,00
Perdesaan	6,92	31,04	62,04	100,00
Total	6,25	31,95	61,80	100,00

Sumber : Susenas, 2015

Data Susenas 2015 memperlihatkan bahwa masih banyak anak usia 0-6 tahun yang tidak pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Pada tahun 2015, persentase anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebesar 62,04 persen di perdesaan dan 60,94 persen di perkotaan. Secara keseluruhan terdapat 61,80 persen anak usia 0-6 tahun yang tidak pernah mengikuti

pendidikan prasekolah. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 65,49 persen. Pada kurun waktu 2014-2015 terlihat adanya peningkatan partisipasi anak yang mengikuti pendidikan prasekolah, yaitu dari 21,63 persen menjadi 31,95 persen.

Gambar 4.1. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber : Susenas, 2014-2015

Tingginya persentase anak usia 0-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah ini disebabkan tidak adanya anak usia 0-2 tahun yang mengikuti pendidikan ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2 juga memperlihatkan bahwa pendidikan prasekolah pada tahun 2015 sebagian besar diikuti atau pernah diikuti oleh anak usia 5-6 tahun (91,35 persen). Sementara itu, hanya ada 47,25 persen anak usia 3-4 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah.

Tabel 4.2. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015

Tipe Daerah	Kelompok Umur (Tahun)			
	0-2	3-4	5-6	0-6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	0,00	71,31	91,27	39,06
Perdesaan	0,00	40,65	91,36	37,95
Total	0,00	47,25	91,35	38,20

Sumber : Susenas, 2015

Dilihat berdasarkan tipe daerah, tampak bahwa anak di daerah perkotaan lebih banyak yang berpartisipasi pada pendidikan pra sekolah dari pada anak di daerah perdesaan (39,06 persen dibanding 37,95 persen). Hal inikhususnya terjadi pada kelompok umur 3-6 tahun. Kebiasaan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan mobilitas yang lebih tinggi dalam pekerjaan kemungkinan turut berperan pada tingginya partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan prasekolah secara lebih dini. Selain itu, kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan prasekolah juga berpengaruh terhadap keputusan untuk mengikutsertakan anak dalam pendidikan prasekolah.

Tabel 4.3. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015

Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			
	0-2	3-4	5-6	0-6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	0,00	43,20	80,49	31,48
Perempuan	0,00	52,20	100,00	45,67
Total	0,00	47,25	91,35	38,20

Sumber : Susenas, 2015

Partisipasi prasekolah anak laki-laki terlihat lebih kecil dibanding anak perempuan. Pada anak laki-laki usia 0-6 tahun partisipasi pendidikan prasekolah mencapai 31,48 persen, sedangkan untuk perempuan mencapai 45,67 persen. Pola ini terjadi pada semua kelompok umur.

Jenis pendidikan prasekolah Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal atau Raudatul Athfal (TK/BA/RA) menjadi pilihan utama orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tampak dari besarnya anak yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah di TK/BA/RA yang mencapai 63,09 persen. Sementara itu, 33,85 persen anak mengikuti pendidikan pada Tempat Penitipan Anak dan 3,06 persen sisanya mengikuti pendidikan di Kelompok Bermain dan Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu.

Tabel 4.4. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Kabupaten Blora, 2015

Tipe Daerah	Jenis Pendidikan Pra Sekolah					Total
	TK/BA/RA	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu	PAUD Sejenis Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	59,58	5,22	35,20	0,00	0,00	100,00
Perdesaan	64,14	0,00	33,43	2,43	0,00	100,00
Total	63,09	1,20	33,85	1,86	0,00	100,00

Sumber : Susenas, 2015

4.2. Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha peningkatan mutu SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal di sekolah. Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk meningkatkan mutu SDM yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora, 2015

Tipe Daerah	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak sekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	11,40	22,22	66,38
Perdesaan	13,47	20,03	66,50
Total	12,98	20,55	66,47

Sumber : Susenas, 2015

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 12,98 persen, penduduk yang masih sekolah ada sebesar 20,55 persen, dan penduduk yang sudah tidak sekolah lagi sebesar 66,47 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk pada ketiga kategori tersebut tidak terlalu berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan pendidikan baik di perkotaan maupun perdesaan sudah cukup seimbang dan merata.

Tabel 4.6. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora, 2015

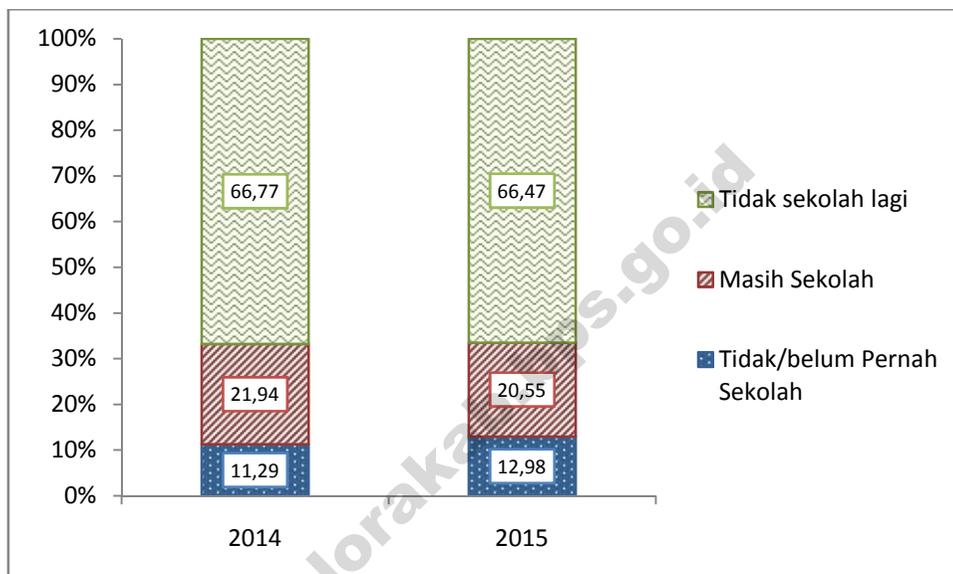
Jenis Kelamin	Tidak/belum pernah sekolah	Masih sekolah	Tidak sekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	8,35	21,82	69,83
Perempuan	17,38	19,34	63,28
Total	12,98	20,55	66,47

Sumber : Susenas, 2015

Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, perbedaan yang cukup signifikan terjadi pada kelompok tidak/belum pernah sekolah, dimana untuk perempuan mencapai 17,38 persen, sedangkan untuk laki-laki hanya mencapai

8,35 persen. Hal sebaliknya terjadi pada mereka yang tidak bersekolah lagi. Laki-laki yang tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 69,83 persen, lebih tinggi dibanding perempuan yang mencapai 63,28 persen.

Gambar 4.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber : Susenas, 2014-2015

Dibandingkan dengan tahun 2014, persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah tampak menurun dari 21,94 persen menjadi 20,55 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah (dari 11,29 persen menjadi 12,98 persen) dan menurunnya persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi dari 66,77 persen menjadi 66,47 persen.

Tabel 4.7. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2015

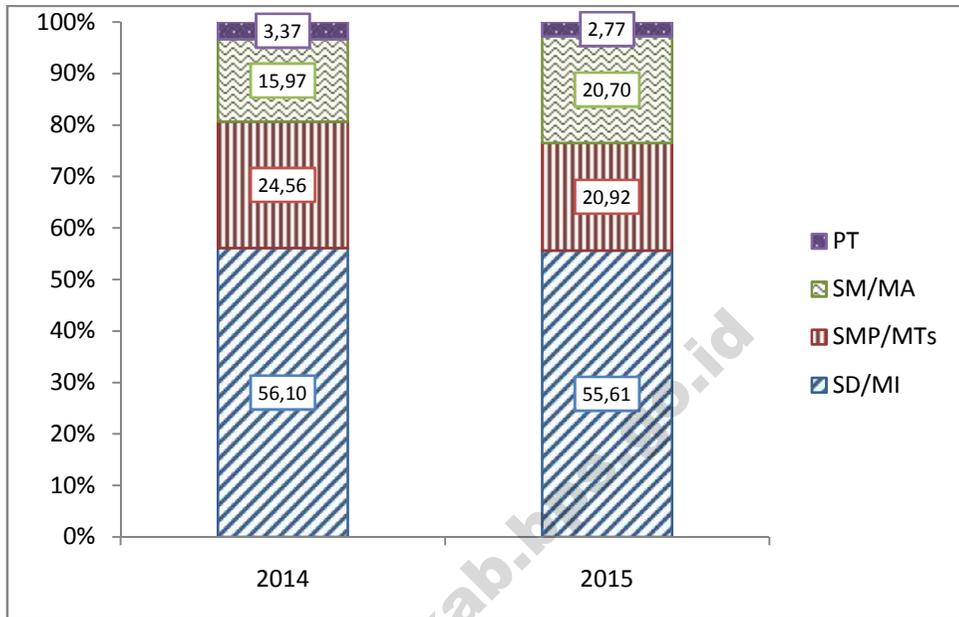
Tipe Daerah	Jenjang Pendidikan				Total
	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	53,69	21,95	20,13	4,23	100,00
Perdesaan	56,27	20,57	20,89	2,27	100,00
Total	55,61	20,92	20,70	2,77	100,00

Sumber : Susenas, 2015

Dari sejumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah diketahui bahwa sebagian besarnya, yaitu 55,61 persen sedang menempuh pendidikan SD/MI. Sementara itu, hanya ada sebesar 2,77 persen penduduk umur 5 tahun ke atas yang menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.. Dari tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah persentase penduduk yang mengikutinya. Hal ini mengindikasikan tidak semua penduduk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Persentase penduduk yang sedang menempuh pendidikan tingkat SM/MA terlihat meningkat dari 15,97 persen pada tahun 2014 menjadi 20,70 persen pada tahun 2015. Sementara itu, persentase penduduk yang sedang menempuh pendidikan selain SM/MA terlihat menurun selama kurun dua tahun terakhir. Penurunan paling besar terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dimana pada tahun 2014 mencapai 24,56 persen menjadi 20,92 persen pada tahun 2015.

Gambar 4.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Sedang Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber : Susenas, 2014-2015

4.3. Angka Partisipasi Kasar

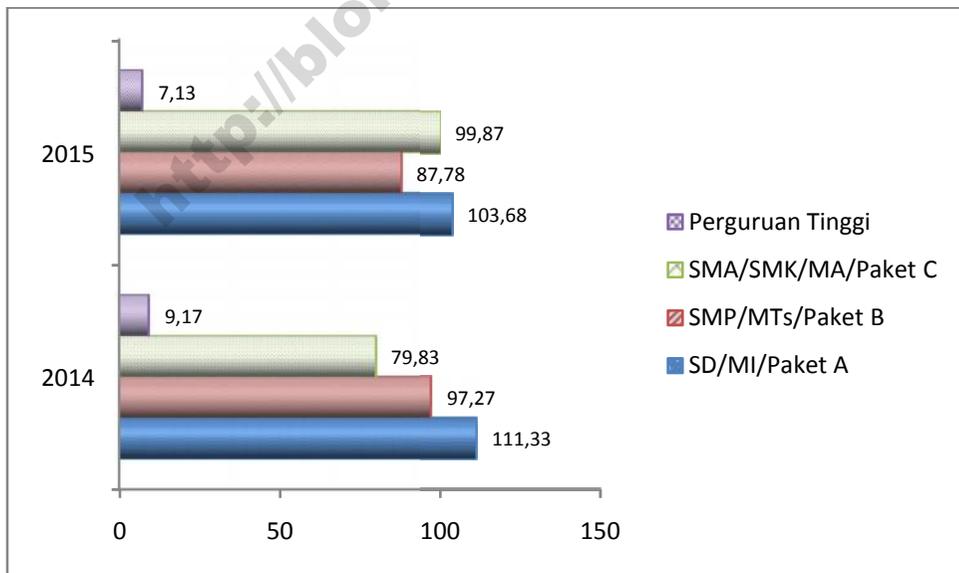
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menggambarkan partisipasi sekolah penduduk sesuai dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Batasan usia yang digunakan dalam penghitungan APK untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi masing-masing adalah 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun. Sebagai contoh, APK SD merupakan persentase

jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah ataupun pengulangan kelas.

Semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai APK akan semakin rendah, yang berarti bahwa tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin menurun. Di samping itu, dapat dilihat pula adanya perbedaan yang mencolok antara APK di perdesaan dan perkotaan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi. APK di daerah perkotaan secara umum tampak lebih baik dibanding daerah perdesaan. APK untuk murid laki-laki juga lebih besar dibanding anak perempuan, kecuali untuk APK tingkat SMP.

Gambar 4.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber : Susenas, 2014-2015

Grafik di atas menunjukkan APK SD/MI tahun 2015 sebesar 103,68. Sementara untuk APK tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 87,78 persen dan 99,87 persen. APK untuk tingkat perguruan tinggi tercatat masih sangat rendah yakni 7,13 persen. Dibandingkan tahun 2014, APK terlihat menurun untuk masing-masing jenjang pendidikan kecuali untuk jenjang SMA/SMK/MA yang meningkat dari 79,83 persen menjadi 99,87 persen.

4.4. Angka Partisipasi Murni

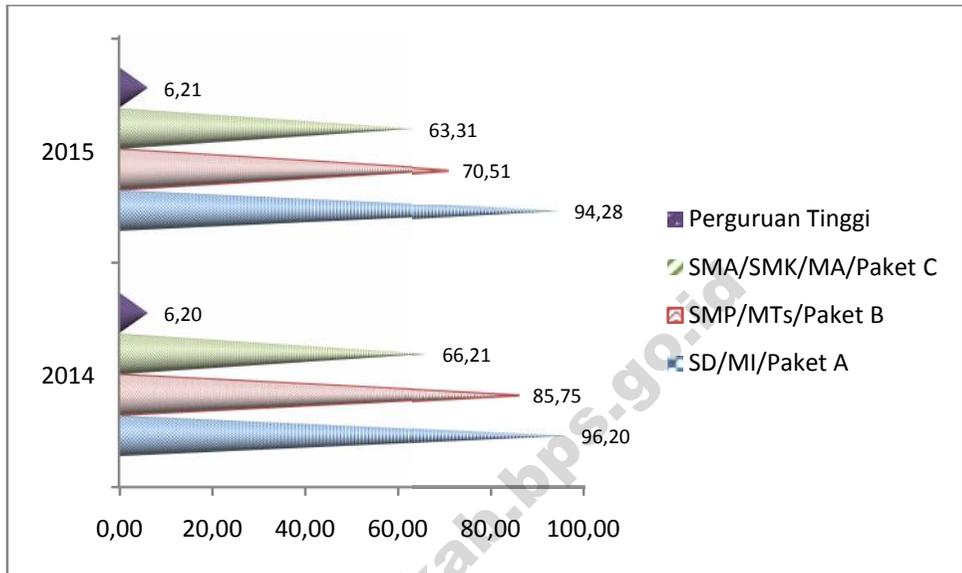
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Idealnya, angka APM mencapai 100, yang berarti bahwa seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Sama halnya dengan APK, APM juga menggunakan batasan umur dalam penghitungannya, yaitu usia 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi. Sebagai gambaran APM SD adalah proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Biasanya APM akan lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Selama kurun waktu 2014-2015 APM di Kabupaten Blora menunjukkan penurunan pada semua jenjang pendidikan. Besarnya APM juga terlihat semakin kecil seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Pada tahun 2015, APM SD/MI, APM SLTP/MTs dan APM SMA/MA masing-masing mencapai

94,28persen, 70,51 persen, dan 63,31 persen. Sementara itu APM Perguruan tinggi hanya mencapai 6,21 persen.

Gambar 4.7. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber : Susenas, 2014-2015

BAB V

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

5.1. Angka Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek aksara merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca-tulis juga

berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 5.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015

Tipe Daerah	Kelompok Umur			
	15-24 Tahun	25-44 Tahun	45 Tahun Ke Atas	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	98,83	98,47	76,50	88,89
Perdesaan	100,00	99,10	69,87	86,38
Total	99,71	98,95	71,43	86,97

Sumber: Susenas, 2015

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 15 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 86,38 persen, lebih rendah dibanding daerah perkotaan yang sebesar 88,89 persen. Kondisi seperti ini terutama terjadi pada penduduk dengan kelompok usia 45 tahun ke atas, dimana persentase melek huruf di perdesaan hanya mencapai 69,87 persen dibanding di perkotaan yang mencapai 76,50 persen.

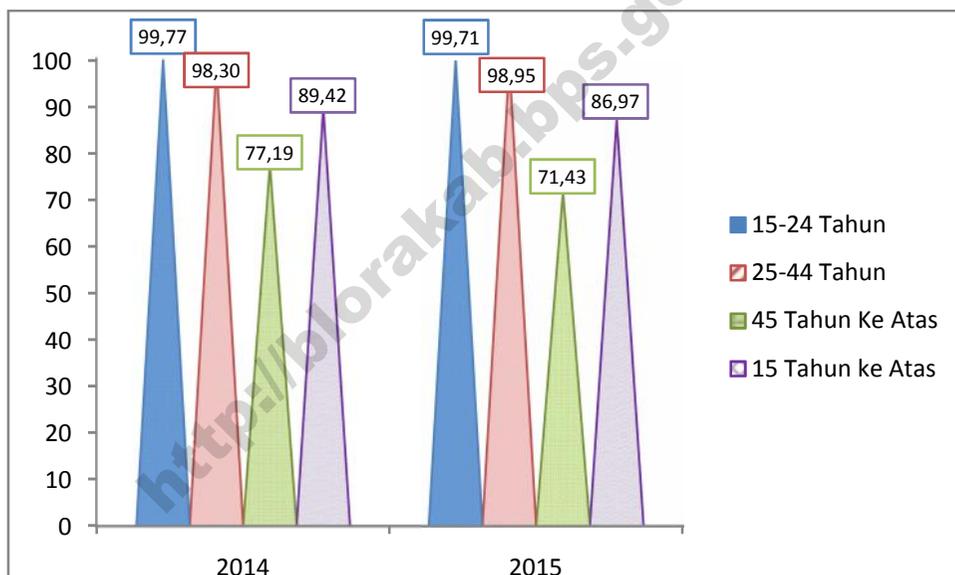
Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2015

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	15-24 Tahun	25-44 Tahun	45 Tahun Ke Atas	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	99,38	99,78	82,80	92,18
Perempuan	100,00	98,18	60,64	82,09
Total	99,71	98,95	71,43	86,97

Sumber: Susenas, 2015

Persentase penduduk perempuan melek huruf umur 15 tahun ke atas sebesar 82,09 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan laki-laki melek huruf pada kelompok umur yang sama yang mencapai 92,18 persen. Pola seperti ini juga terjadi pada kelompok umur 25-44 tahun, dan 45 tahun ke atas. Hal sebaliknya terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, dimana angka melek huruf perempuan mencapai 100 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki yang sebesar 99,38 persen.

Gambar 5.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber: Susenas, 2014-2015

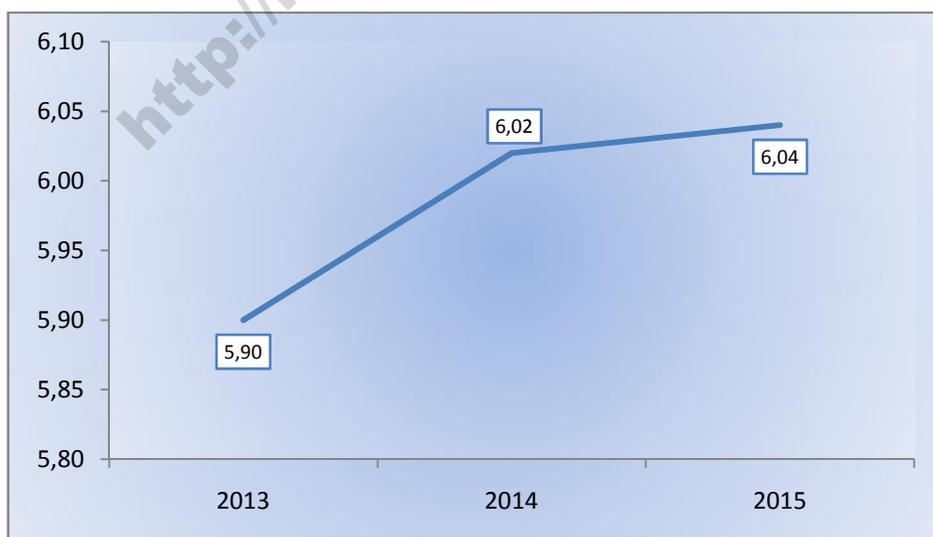
Dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum persentase melek huruf pada tahun 2015 justru mengalami penurunan dari 89,42 persen menjadi 86,97 persen. Penurunan ini utamanya disumbang oleh menurunnya persentase melek huruf pada penduduk 45 tahun ke atas.

5.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 5.2. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Blora, 2013-2015



Sumber: Susenas, 2015

Secara umum, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Blora pada tahun 2013 baru mencapai 5,90 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk mengalami putus sekolah di kelas 6 SD. Namun, keadaan pada tahun-tahun berikutnya terlihat semakin membaik, dimana rata-rata lama sekolah mencapai 6,02 persen pada tahun 2014 dan 6,04 persen pada tahun 2015. Artinya, rata-rata penduduk mengalami putus sekolah mengalami putus sekolah saat kelas 1 SMP, atau setelah lulus pendidikan tingkat SD.

Tabel 5.3. Angka Putus Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2015

Jenis Kelamin	Angka Putus Sekolah SMA	Angka Putus Sekolah SMP	Angka Putus Sekolah SD
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	12,13	4,10	1,88
Perempuan	0,00	7,96	0,00
Total	6,66	6,27	0,99

Sumber: Susenas, 2015

Pada tahun 2015, angka putus sekolah SD tercatat sebesar 0,99 persen, yang berarti bahwa ada 0,99 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah lagi dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah atau sedang sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA tampak lebih tinggi, yaitu masing-masing mencapai 6,27 persen dan 6,66 persen. Angkaputus sekolah pada tingkat SD dan SMA didominasi oleh laki-laki, sementara untuk tingkat SMP didominasi oleh perempuan.

5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah) karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Blora, 2015

Tipe Daerah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Total
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/MI	SMP/ MTs	SM/ MA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	12,72	9,86	23,28	14,94	29,74	9,46	100,00
Perdesaan	14,27	18,13	38,79	16,53	10,02	2,26	100,00
Total	13,91	16,20	35,18	16,16	14,61	3,94	100,00

Sumber: Susenas, 2015

Secara umum, pendidikan masyarakat Blora masih tergolong rendah, dimana ada 13,91 persen penduduk yang belum pernah sekolah, 16,20 persen penduduk yang tidak tamat SD, dan hanya ada 3,94 persen penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Sebagian besar penduduk, yaitu 35,18 persen hanya memperoleh pendidikan sampai tingkat SD.

Tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas ada sebanyak 54,14 persen. Pada jenjang pendidikan ini untuk daerah perdesaan hanya mencapai 28,81 persen. Dengan kata lain, 71,19 persen penduduk di perdesaan masih berpendidikan SD atau di bawahnya.

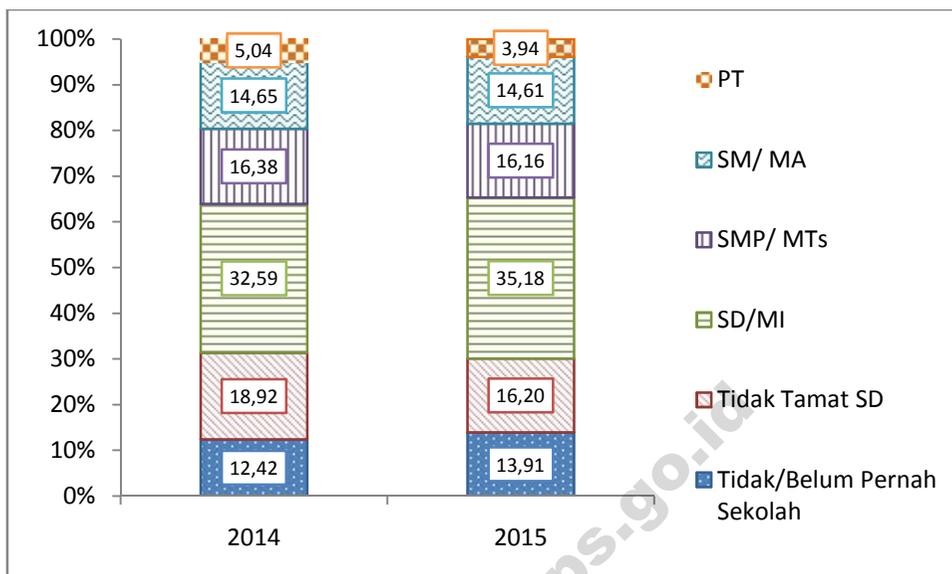
Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 19,06 persen. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan persentase laki-laki yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, yakni mencapai 8,31 persen. Untuk kategori tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP dan kategori di atasnya, tampak bahwa persentase laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Blora, 2015

Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Total
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/MI	SMP/ MTs	SM/MA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	8,31	17,51	35,58	18,04	16,25	4,31	100,00
Perempuan	19,06	15,00	34,82	14,43	13,10	3,60	100,00
Total	13,91	16,20	35,18	16,16	14,61	3,94	100,00

Sumber: Susenas, 2015

Gambar 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2014-2015



Sumber: Susenas, 2014-2015

Perkembangan tingkat pendidikan penduduk Blora selama kurun 2014-2015 belum menunjukkan banyak perubahan yang positif. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan SD meningkat dari 32,59 persen menjadi 35,18 persen. Sementara itu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan SMP atau lebih justru mengalami penurunan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penduduk laki-laki yang sedang sekolah di Kabupaten Blora pada tahun 2015 tercatat lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Demikian halnya dengan penduduk perkotaan, lebih banyak dibanding penduduk perdesaan yang sedang mengikuti pendidikan. Pola yang serupa juga tampak pada beberapa indikator partisipasi pendidikan, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pembangunan pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Blora mengikuti pendidikan selama 6,63 tahun. Hal ini selaras dengan mayoritas penduduk yang masih berpendidikan SD atau kurang, sementara penduduk yang berpendidikan sampai perguruan tinggi hanya mencapai 5,04 persen. Namun demikian, angka melek huruf untuk penduduk 15 tahun ke atas sudah mencapai 89,42 persen.

6.2. Saran

Pemenuhan tujuan *Education for All* yang belum tercapai sepenuhnya harus tetap diupayakan untuk terciptanya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan target-target yang dicanangkan untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2014*. Semarang: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Pendidikan 2014*. Jakarta: BPS.

<http://suparlan.com/1106/sepintas-kilas-tentang-education-movement-dan-mdgs>

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=12>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<http://blorakab.bps.go.id>

D A T A
MIENCERDASKAN
BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BLORA

Jalan Rajawali No. 12 Blora
Telp/Fax : (0296) 531191

Email : bps33316@bps.go.id
Website : blorakab.bps.go.id